

# PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

**ALIMINA, ASRUL**

**Pembimbing : Prof.Dr. NUR BASUKI MINARNO, S.H., M.Hum.**

## **CORRUPTION;CRIMINAL LAW**

KKB KK-2 TH 51 / 10 Ali p

Copyright: @ 2010 by Airlangga University Library Surabaya

### **ABSTRAK**

Korupsi telah dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa yang telah membawa bencana bagi kehidupan perekonomian Nasional dan pelaku tindak pidana korupsi tersebut banyak merupakan kalangan yang terpelajar serta di lakukan oleh lebih dari seorang yang semuanya mempunyai kepentingan di dalamnya sehingga untuk mengungkap kejahatan tersebut tidak dapat lagi di lakukan secara biasa akan tetapi di perlukan upaya-upaya yang luar biasa, termasuk di dalamnya mengatasi kendala pembuktian Tindak Pidana Korupsi yang selama ini terasa cukup sulit oleh karena sistem pembuktian secara negatif menurut Undang-undang yang di anut oleh KUHAP terasa belum memadai untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi tersebut, sehingga di perlukan sistem pembalikan beban pembuktian dengan maksud agar Penuntut Umum lebih mudah membuktikan tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh tersangka, khususnya menyangkut gratifikasi dan harta benda yang terungkap di persidangan yang di duga berasal dari tindak pidana korupsi.

Tipe dari penelitian ini adalah menggunakan *Doctrinal Research* serta *Theoretical Research* dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan juga digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta bahan penelitian yang di gunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum skunder serta bahan hukum tersier dengan langkah-langkah mengidentifikasi fakta hukum yang akan di pecahkan, pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan yang relevan dengan bahan-bahan hukum jika di perlukan, melakukan analisa atau telaahan atas isu hukum berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah ada yang nantinya akan menjawab isu hukum serta penelitian ini diharapkan memberikan suatu preskripsi terhadap isu atau masalah hukum yang diangkat. Hal ini berkaitan dengan sifat ilmu hukum yang terapan dan preskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa ternyata pembalikan beban pembuktian yang terdapat di dalam UUP Tipikor tidak dapat di terapkan di dalam praktek oleh karena Hukum Acara Pidana yang menganut sistem pembuktian negatif menurut Undang-undang tidak memberikan ruang bagi sistem pembalikan beban pembuktian seperti yang terdapat di dalam UUP Tipikor serta sistem pembalikan beban pembuktian tersebut juga bertentangan dengan HAM yang di akui dan dilindungi oleh Konstitusi kita serta konvensi-konvensi Internasional yang telah kita ratifikasi maupun belum di ratifikasi, sehingga di perlukan adanya perubahan terhadap KUHAP ataupun hukum acara Pidana yang di atur di dalam UUP Tipikor agar sistem Pembalikan beban Pembuktian dapat di terapkan dengan baik

Kata Kunci : Pembalikan, Beban, Pembuktian

### ABSTRACT

*Corruption have been considered to be a remarkable badness and brought the disaster for life of national economy and doing an injustice perpetrator the corruption a lot of representing literate circle and also conducting by more than a all have the importance in it so that show of the badness cannot again in ordinaryly however in needing remarkable efforts, inclusive of in it overcome the constraint of verification of Doing An Injustice of Corruption which during the time felt difficult enough because of Negative Legal Evident Theory System according to the Rules which is embracing by criminal procedure (KUHAP) felt not yet adequate to ensnare the doing an injustice perpetrator the corruption, so that, in needing system of reserve Burden of Proof for the purpose of so that easier Publik Prosecutor prove the doing an injustice of corruption which is conducting by, specially concerning grafication and Property and chattel expressed in conference which anticipating to come from doing an injustice corruption.*

*Type from this research use the Doctrinal Research and also Theoretical Research by using Statute Approach as well as used by a conceptual approach, and materials which are used consist of primary law, secondary law, and tertiary law ones with the stages; steps identify the law fact to solve, substance gathering punish and substance which relevan with the substance punish if needed, doing analyze for issue punish pursuant to law substance which which there have later will reply the issue punish and also this research is expected to give an prescription to issue or lifted law problem. This matter go together the nature of law science which applied and prescriptive.*

*Based on the research result, that in the reality reserve Burden of Proof which is there are in Indonesia Anti Corruption Act (UUP Tipikor) cannot applied in practice because of Procedure of criminal embracing Negative Legal Evident Theory system according to Code do not give the space for system of reserve Burden of Proof such as those which*

*there are in UUP Tipikor and also system of reserve Burden of Proof also oppose against the Human Rights (HAM) which is confessing and under the aegis of our Constitution and also International conventions which we have ratified and also not yet ratified, so that in needing the existence of change to KUHAP and or procedure of criminal which arranged in UUP Tipikor so that system of reserve Burden of Proof earn to applied better.*

*Keyword : Reserve, Burden, Proof.*

